

Pemberantasan Femisida di Meksiko: Kebijakan Kriminal yang Tertunda dan Dampak Sosialnya

Zul Khaidir Kadir¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

e-mail: zulkhaidirkadir@gmail.com

*Zul Khaidir Kadir

ABSTRACT

Femisida merupakan kejahatan yang menyerang perempuan sebagai korbannya. Di Meksiko, jumlah perempuan yang dibunuh karena gender mereka meningkat secara konsisten selama dekade terakhir. Sayangnya, banyak kasus tidak dilaporkan, salah diklasifikasikan, atau tidak diinvestigasi yang menciptakan hambatan besar dalam memberikan keadilan bagi korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan konseptual. Metode pengumpulan data dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan, lalu dianalisis menggunakan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa femisida di Meksiko merupakan cerminan dari kegagalan sistemik yang berakar pada ketimpangan gender, lemahnya institusi penegak hukum, dan budaya impunitas yang mengakar dalam masyarakat. Meskipun upaya legislasi telah dilakukan dengan mengakui femisida sebagai kejahatan pidana khusus, implementasinya masih jauh dari memadai. Reformasi kebijakan di Meksiko harus berfokus pada harmonisasi hukum di seluruh wilayah, peningkatan kapasitas institusional, penguatan mekanisme pengawasan independen untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Selain itu langkah preventif diperlukan agar dapat menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih adil serta masyarakat yang setara dan bebas dari kekerasan berbasis gender.

Keywords: *Femisida; Meksiko; Kebijakan Kriminal.*

Article submission: 16 Jan 25

Article revision: 17 Jan 25

Article acceptance: 19 Jan 25

I. INTRODUCTION

Femisida merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling brutal terhadap perempuan, ditandai dengan pembunuhan yang dimotivasi oleh kebencian berbasis gender atau keinginan untuk mempertahankan dominasi patriarki.¹ Fenomena ini mencerminkan kegagalan mendasar dalam sistem sosial, hukum, dan politik, yang

¹ Albana Metaj-Stojanova, Femicide-The Most Extreme Form of Violence Against Women, *Knowledge International Journal*, Vol. 40, No. 6, 2020, hlm 1071-1076.

seharusnya melindungi hak hidup dan martabat perempuan. Meksiko, sebuah negara yang dikenal karena tingkat kekerasan berbasis gender yang sangat tinggi, telah menjadi pusat perhatian global dalam perdebatan mengenai keadilan gender. Data menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang dibunuh karena gender mereka meningkat secara konsisten selama dekade terakhir. Tidak hanya jumlahnya yang mengkhawatirkan, tetapi juga brutalitas dan pola berulang yang terlihat dalam kejahatan-kejahatan tersebut, yang sering melibatkan kekerasan seksual, mutilasi, atau pembakaran, sebagai manifestasi dari kebencian mendalam terhadap perempuan. Fenomena ini tidak hanya merusak individu dan keluarga yang terlibat, tetapi juga menghancurkan struktur sosial yang lebih luas, menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan lembaga peradilan, serta melahirkan trauma kolektif yang mendalam.

Sistem hukum pidana di Meksiko telah mencoba menanggapi persoalan ini dengan mengadopsi kebijakan kriminal yang secara spesifik mengakui femisida sebagai kejahatan yang berbeda dari pembunuhan biasa. Namun, efektivitas kebijakan tersebut diragukan, mengingat tingkat impunitas yang mencapai angka 90 persen untuk kasus-kasus femisida yang dilaporkan. Tingginya angka impunitas tidak hanya mencerminkan kelemahan dalam investigasi dan proses peradilan, tetapi juga mengungkapkan keberadaan korupsi, kurangnya pelatihan aparat penegak hukum, serta tekanan politik yang sering kali lebih mementingkan stabilitas daripada keadilan. Selain itu, kebijakan yang diterapkan di tingkat nasional sering kali tidak sesuai atau tidak diimplementasikan secara merata di tingkat negara bagian, mengingat otonomi yang dimiliki oleh masing-masing yurisdiksi di Meksiko. Hal ini menciptakan ketimpangan besar dalam perlakuan terhadap kasus femisida, dengan beberapa negara bagian menunjukkan tingkat penuntutan yang rendah atau bahkan tidak ada sama sekali. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun ada pengakuan hukum terhadap femisida, implementasi praktisnya masih jauh dari harapan.

Femisida di Meksiko tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial yang lebih luas, di mana norma-norma patriarkal dan ketimpangan gender menjadi faktor utama

yang memungkinkan kekerasan semacam ini terus berlangsung.² Dalam banyak kasus, pelaku femisida berasal dari lingkungan dekat korban, seperti pasangan, anggota keluarga, atau rekan kerja, yang menunjukkan bahwa femisida sering kali bermula dari dinamika kekuasaan yang tidak setara dalam hubungan interpersonal. Selain itu, lingkungan sosial yang permisif terhadap kekerasan terhadap perempuan juga memperparah masalah ini. Stigma yang melekat pada perempuan korban kekerasan, terutama dalam kasus kekerasan seksual, sering kali menghalangi mereka untuk mencari keadilan. Bahkan ketika kasus dilaporkan, sistem peradilan cenderung gagal memberikan perlindungan yang memadai atau bahkan menyalahkan korban atas apa yang dialami. Padahal laporan adalah sumber investigasi.³ Situasi ini menciptakan lingkaran setan di mana kekerasan terus berlanjut karena tidak adanya konsekuensi yang nyata bagi pelaku.

Peran media dalam membentuk persepsi publik terhadap femisida juga patut diperhatikan. Liputan media tentang kasus femisida di Meksiko sering kali terjebak dalam pola pelaporan yang sensasional tanpa menawarkan analisis kritis terhadap akar permasalahan. Perempuan korban sering kali direduksi menjadi angka statistik atau menjadi objek eksploitasi visual, sementara fokus terhadap pelaku atau sistem yang memungkinkan kekerasan ini berlangsung sering kali terabaikan. Sebaliknya, ketika pelaku diidentifikasi, narasi media sering kali lebih simpatik terhadap mereka dibandingkan dengan korban, yang mencerminkan bias mendalam dalam cara masyarakat melihat dan memahami kejahatan berbasis gender. Pendekatan seperti ini tidak hanya gagal memicu perubahan sosial yang diperlukan, tetapi juga memperkuat norma-norma yang mendukung kekerasan terhadap perempuan.

Fenomena femisida di Meksiko juga memiliki hubungan yang erat dengan dinamika kejahatan terorganisir dan perdagangan narkoba, yang telah lama menjadi masalah utama di negara tersebut.⁴ Dalam beberapa kasus, perempuan dibunuh sebagai alat untuk mengirim pesan kepada kelompok kriminal lainnya, atau sebagai

² Sonia M. Frias, *Femicide and Feminicide in Mexico: Patterns and Trends and Non-Indigenous Regions*, *Feminist Criminology*, Vol. 18, No. 1, 2021, hlm 3-23.

³ Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khaidir Kadir, *Hukum Acara Pidana Adversarial* (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2020).

⁴ Giselle Figueroa, *Rethinking 'Femicide': The Role of Organized Crime Groups in Increased Rates of Femicide in Mexico*, *Willam & Mary*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm 1-52.

bagian dari perdagangan manusia yang sering kali terkait dengan eksploitasi seksual. Dinamika ini membuat investigasi kasus femisida menjadi lebih kompleks, karena melibatkan aktor-aktor kriminal yang kuat dengan jaringan luas dan akses ke sumber daya yang signifikan. Selain itu, hubungan antara kejahatan terorganisir dan institusi pemerintah yang korup sering kali menghalangi upaya untuk mengadili pelaku, karena penyelidikan yang mendalam dapat mengungkap keterlibatan pejabat publik dalam aktivitas ilegal. Situasi ini menciptakan budaya impunitas yang semakin mengakar, di mana pelaku kejahatan merasa kebal dari konsekuensi hukum.

Dampak dari femisida terhadap masyarakat Meksiko tidak dapat dilebih-lebihkan. Kehilangan nyawa perempuan yang tidak hanya brutal tetapi juga tidak dihukum menciptakan rasa ketidakberdayaan yang mendalam di kalangan masyarakat, terutama di kalangan perempuan. Ketidakpercayaan terhadap institusi negara, termasuk kepolisian dan peradilan, meningkat, yang pada akhirnya memperlemah legitimasi pemerintah di mata publik. Selain itu, keluarga korban sering kali menjadi korban sekunder, mengalami trauma berkepanjangan akibat kehilangan yang mereka alami serta kegagalan sistem dalam memberikan keadilan. Beberapa keluarga bahkan menghadapi ancaman atau tekanan untuk menghentikan upaya mereka mencari keadilan, yang mencerminkan kurangnya perlindungan bagi mereka yang paling rentan dalam sistem ini.

Dalam merespons situasi ini, berbagai kelompok masyarakat sipil, terutama gerakan feminis, telah mengambil peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan mendorong perubahan. Demonstrasi besar-besaran yang menuntut keadilan bagi korban femisida telah menjadi pemandangan umum di kota-kota besar di Meksiko, dengan slogan-slogan seperti *Ni Una Más* (Tidak Satu Lagi) menjadi simbol perlawanan terhadap kekerasan berbasis gender. Tekanan dari masyarakat sipil ini telah memaksa pemerintah untuk mengambil beberapa langkah, seperti meningkatkan anggaran untuk program perlindungan perempuan dan memperkenalkan undang-undang baru untuk menangani femisida. Namun, langkah-langkah ini sering kali bersifat reaktif dan tidak disertai dengan komitmen jangka panjang untuk mengatasi akar masalah. Akibatnya, dampaknya terhadap tingkat femisida secara keseluruhan masih minim.

Melihat dari perspektif kebijakan kriminal, upaya pemberantasan femisida di Meksiko menghadapi beberapa tantangan utama. Salah satu yang paling mendasar adalah kurangnya data yang akurat dan dapat dipercaya tentang kasus femisida. Banyak kasus tidak dilaporkan atau diklasifikasikan dengan benar. Selain itu, kelemahan dalam pelatihan dan kapasitas aparat penegak hukum untuk menangani kasus kekerasan berbasis gender juga menjadi hambatan signifikan. Padahal permasalahan tersebut menurut penulis sudah termasuk dalam kategori kejahatan yang harus diprioritaskan penegakan hukumnya.⁵ Ketidakmampuan untuk mengidentifikasi pola kekerasan atau mengumpulkan bukti yang relevan sering kali menyebabkan kasus femisida tidak berhasil diadili. Di sisi lain, kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, menciptakan fragmentasi yang menghambat efisiensi proses hukum. Penelitian ini akan mengeksplorasi lebih lanjut dimensi-dimensi ini, dengan tujuan untuk menawarkan analisis yang kritis dan solusi yang dapat diterapkan secara praktis.

II. METHODS

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah pendekatan dalam penelitian yang bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual berfokus pada analisis konsep atau teori yang relevan. Semua bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan, lalu dianalisis menggunakan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

III. RESULTS

⁵ Zul Khaidir Kadir, *Fragmented Justice: How the Wedding Cake Model is Influenced by the 'No Viral, No Justice' Phenomenon*, *International Journal of Law Analytics (IJLA)*, Vol. 2, No. 4, 2024, hlm 315-330.

Konsep Femicida dan Kompleksitas Hukumnya

Femisida didefinisikan sebagai pembunuhan terhadap perempuan yang dimotivasi oleh kebencian berbasis gender.⁶ Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Diana E. H. Russell pada tahun 1976 untuk menggambarkan kasus-kasus pembunuhan perempuan yang dipengaruhi oleh norma-norma patriarki dan kontrol sosial terhadap tubuh serta peran perempuan. Dalam pengertian tersebut, femisida tidak hanya melibatkan tindakan kekerasan yang menghilangkan nyawa perempuan, tetapi juga merupakan manifestasi dari diskriminasi dan sistemik yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinasi. Secara spesifik, pembunuhan ini sering kali dilakukan oleh pasangan intim, anggota keluarga, atau pelaku lain yang menggunakan kekerasan untuk menegaskan dominasi atas perempuan.

Definisi femisida juga mengacu pada elemen-elemen tertentu yang membedakannya dari pembunuhan umum. Elemen-elemen ini meliputi motif gender, pola kekerasan yang berulang, serta konteks budaya atau struktural yang mendukung tindakan tersebut. Femisida tidak selalu terjadi sebagai hasil dari konflik langsung, tetapi dapat pula disebabkan oleh struktur sosial yang memungkinkan perempuan menjadi sasaran kekerasan tanpa perlindungan yang memadai. Dalam kasus tertentu, femisida bahkan terkait erat dengan eksploitasi seksual, perdagangan manusia, atau konflik ekonomi di mana perempuan diposisikan sebagai objek yang dapat dikendalikan atau dimanfaatkan.

Dalam konteks hukum internasional, pengakuan terhadap femisida telah berkembang secara bertahap.⁷ Konvensi Belém do Pará (1994), yang diadopsi oleh negara-negara di Amerika Latin, menjadi salah satu dokumen pertama yang mengakui kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Konvensi ini mendorong negara-negara anggota untuk mengimplementasikan kebijakan yang lebih tegas dalam mencegah dan menghukum kekerasan berbasis gender. Seiring dengan itu, istilah femisida mulai digunakan dalam legislasi nasional di beberapa negara untuk mengidentifikasi dan menangani kasus-kasus pembunuhan

⁶ Assiye Aka, The Perception of Femicide from the Third Party's Perspective: An Analysis on Justice/Injustice in Turkiye, *Sociology Mind*, Vol. 13, No. 3, 2023, hlm 123-144.

⁷ Majida Lubura, Concept of Femicide and Importance of Its Legal Regulation, *Strani Pravni Vzivot*, Vol. 1, No.3, 2017, hlm 115-130.

perempuan yang memiliki elemen gender sebagai faktor utama. Di Meksiko, misalnya, femisida diakui secara hukum sejak tahun 2012 melalui amandemen terhadap sistem hukum pidana, yang secara khusus mendefinisikan kejahatan ini sebagai pembunuhan terhadap perempuan dengan alasan yang berkaitan dengan gendernya.

Meskipun demikian, definisi hukum femisida sering kali berbeda-beda antarnegara, yang menciptakan tantangan dalam penerapannya. Di beberapa negara, femisida hanya diakui sebagai pembunuhan yang dilakukan oleh pasangan intim atau anggota keluarga, sementara di negara lain, definisinya mencakup semua bentuk pembunuhan perempuan yang terkait dengan ketidaksetaraan gender, termasuk yang dilakukan oleh pihak yang tidak dikenal. Perbedaan ini menimbulkan kesulitan dalam mengukur skala fenomena tersebut secara global, serta membatasi kemampuan untuk mengembangkan kebijakan yang terkoordinasi di tingkat internasional. Selain itu, banyak negara yang masih belum mengadopsi definisi femisida dalam sistem hukumnya, sehingga kasus-kasus pembunuhan perempuan yang memiliki motif gender sering kali diperlakukan sebagai pembunuhan biasa tanpa mempertimbangkan aspek-aspek khusus yang menyertainya.

Definisi femisida juga berfungsi untuk mengamati aspek-aspek gender dalam kekerasan terhadap perempuan yang sering kali terabaikan dalam sistem hukum tradisional. Femisida bukan hanya soal kekerasan fisik yang berujung pada kematian, tetapi juga melibatkan proses dehumanisasi yang lebih luas. Sebelum pembunuhan terjadi, korban mengalami kekerasan psikologis, pengendalian ekonomi, atau pengasingan sosial yang dirancang untuk memperkuat dominasi pelaku atas mereka. Selain itu, femisida terjadi dalam konteks di mana norma-norma sosial dan budaya mendukung impunitas bagi pelaku, baik melalui kelemahan dalam sistem peradilan pidana maupun melalui pengaruh nilai-nilai yang menyalahkan korban atas kekerasan yang mereka alami.

Kerangka hukum terkait femisida di Meksiko telah berkembang secara bertahap, didorong oleh tekanan dari masyarakat sipil dan komunitas internasional yang prihatin terhadap tingginya angka kekerasan berbasis gender. Salah satu tonggak penting dalam pengakuan hukum terhadap femisida terjadi pada tahun 2012 ketika

pemerintah federal mengadopsi reformasi hukum yang menjadikan femisida sebagai tindak pidana pidana yang berdiri sendiri.⁸ Melalui amendemen terhadap *Código Penal Federal* (KUHP Federal), pemerintah mendefinisikan femisida sebagai pembunuhan perempuan yang dilakukan oleh pelaku dengan alasan yang berkaitan dengan gender korban. Dalam ketentuan tersebut, beberapa elemen yang diakui sebagai indikasi femisida meliputi tanda-tanda kekerasan seksual sebelum kematian, mutilasi tubuh korban, hubungan emosional atau keluarga antara korban dan pelaku, serta pola ancaman atau pelecehan terhadap korban sebelumnya. Penetapan kerangka hukum ini dimaksudkan untuk memperkuat sistem peradilan dalam menangani kasus-kasus femisida, sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan dari kekerasan berbasis gender.

Meski demikian, pengakuan hukum terhadap femisida sebagai kejahatan pidana tidak serta-merta memperbaiki situasi. Salah satu masalah terbesar yang dihadapi adalah perbedaan penerapan hukum di tingkat negara bagian. Meksiko terdiri dari 32 negara bagian yang memiliki otonomi dalam sistem peradilan pidananya,⁹ sehingga implementasi kebijakan terkait femisida sangat bervariasi. Beberapa negara bagian telah mengadopsi definisi dan prosedur hukum yang serupa dengan KUHP Federal, tetapi yang lain masih menggunakan pendekatan yang lebih tradisional, yang tidak secara eksplisit mengakui elemen gender dalam pembunuhan perempuan. Perbedaan kemudian menciptakan ketimpangan besar dalam penanganan kasus, di mana korban di beberapa wilayah memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan keadilan dibandingkan dengan korban di wilayah lain. Selain itu, kurangnya harmonisasi hukum di seluruh wilayah Meksiko memperburuk fragmentasi dalam sistem peradilan, yang pada akhirnya menghambat upaya nasional untuk memberantas femisida.

Salah satu kelemahan mendasar dalam dasar hukum femisida di Meksiko adalah kesulitan dalam membuktikan elemen gender dalam setiap kasus.¹⁰ Sistem

⁸ Wania Pasinato dan Thiago Pierobom de Avila, Criminalization of Femicide in Latin America: Challenges of Legal Conceptualization, *Current Sociology*, Vol. 71, No. 1, 2022, hlm 60-77.

⁹ Ana Lorena Jiménez Preciado dan Cesar Gurrola Rios, Characterising Crime Incidence in Mexico: A Hierarchical Linkage Clustering Analysis, *Institution and Economies*, Vol. 14, No. 4, 2022, hlm 25-54.

¹⁰ Alejandra Araiza Diaz, Flor Carina Vargas Martinez, dan Uriel Medecigo Daniel, La Tipificación del Femicidio en México. Un Diálogo Entre Argumentos Sociológicos y Jurídicos, *Plos One*, Vol. 18, No. 12, 2023, hlm 1-20.

hukum pidana Meksiko mengharuskan jaksa untuk menunjukkan bukti yang jelas bahwa pembunuhan tersebut bermotif gender, yang sering sulit dilakukan tanpa dukungan investigasi yang memadai. Misalnya, jika seorang korban ditemukan tewas dengan tanda-tanda kekerasan yang tidak langsung menunjukkan elemen gender, kasus tersebut cenderung diklasifikasikan sebagai pembunuhan biasa, bukan femisida. Hal ini mencerminkan kurangnya pelatihan dan pemahaman di antara aparat penegak hukum tentang karakteristik khusus femisida, yang menyebabkan banyak kasus tidak ditangani sesuai dengan kerangka hukum yang ada. Selain itu, pendekatan investigasi yang kurang sensitif terhadap korban sering kali membuat keluarga korban enggan melanjutkan proses hukum, yang semakin memperkuat budaya impunitas.

Di sisi lain, meskipun Meksiko telah memiliki undang-undang untuk menangani femisida, kerangka hukum tersebut kurang memperhatikan dimensi pencegahan. Sebagian besar kebijakan terfokus pada penegakan hukum setelah kejahatan terjadi, dengan sedikit perhatian pada upaya untuk mencegah kekerasan berbasis gender sebelum mencapai titik ekstrem. Misalnya, program pendidikan publik yang dirancang untuk mengubah norma-norma sosial yang mendukung kekerasan terhadap perempuan masih sangat terbatas, baik dalam skala maupun cakupannya. Selain itu, meskipun beberapa negara bagian telah mendirikan pusat layanan bagi korban kekerasan berbasis gender, sumber daya yang tersedia sering kali tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kerangka hukum femisida di Meksiko juga menghadapi tantangan dari segi pengumpulan data dan pelaporan. Banyak kasus femisida tidak tercatat secara resmi karena tidak dilaporkan atau diklasifikasikan dengan benar oleh aparat penegak hukum.¹¹ Kurangnya data yang akurat tentang skala dan pola kejahatan ini membuat sulit bagi pembuat kebijakan untuk merancang strategi yang tepat. Selain itu, kurangnya transparansi dalam proses investigasi dan penuntutan menciptakan kesenjangan informasi yang semakin memperburuk masalah. Untuk mengatasi tantangan ini, Meksiko perlu mengadopsi sistem pengumpulan data yang lebih

¹¹ Myrna Dawson, Haleakala Angus, dan Angelika Zecha, Identifying Femicide Using the United Nations Statistical Frameworks: Exploring the Feasibility of Sex/Gender-Related Motives and Indicators to Inform Prevention, *International Sociology*, Vol. 39, No. 3, 2024, hlm 309-331.

canggih dan terstandarisasi, yang dapat membantu mengidentifikasi tren dan faktor risiko terkait femisida, sekaligus meningkatkan akuntabilitas dalam sistem peradilan.

Statistik Femisida di Meksiko: Tren dan Persepsi

Angka femisida di Meksiko telah menunjukkan peningkatan yang konsisten selama dua dekade terakhir. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh *Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública* (SESNSP), jumlah kasus femisida yang dilaporkan telah melonjak dari 411 kasus pada tahun 2015 menjadi lebih dari 1.000 kasus pada tahun 2021. Angka ini hanya mencakup kasus yang secara resmi diklasifikasikan sebagai femisida, sehingga tidak mencerminkan skala penuh dari masalah tersebut, mengingat banyak kasus pembunuhan perempuan tidak dilaporkan atau salah dikategorikan.¹²

Peningkatan jumlah kasus femisida tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial dan politik yang melingkupi Meksiko. Banyak kasus femisida terjadi di wilayah dengan tingkat kriminalitas tinggi, seperti Ciudad Juárez, Veracruz, dan Mexico City, yang telah lama menjadi pusat kekerasan terhadap perempuan. Wilayah ini sering kali terhubung dengan aktivitas kejahatan terorganisir, termasuk perdagangan manusia dan narkoba, yang semakin memperburuk kerentanan perempuan terhadap kekerasan. Di Ciudad Juárez, misalnya, laporan tentang pembunuhan perempuan telah menjadi perhatian internasional sejak tahun 1990-an, dengan banyak korban yang ditemukan dalam kondisi yang mengindikasikan kekerasan seksual dan penyiksaan sebelum kematian. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menangani masalah ini, data menunjukkan bahwa pola kekerasan tersebut masih berlangsung hingga hari ini.

Konteks sosial-ekonomi juga memainkan peran penting dalam meningkatnya angka femisida di Meksiko. Perempuan dari latar belakang ekonomi rendah dan kelompok masyarakat adat secara tidak proporsional menjadi korban kekerasan. Keterbatasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, dan sistem perlindungan sosial membuat kelompok-kelompok ini lebih rentan terhadap

¹² Eva Selene Hernandez Gress, Martin Flegl, Aleksandra Krstikj, dan Christina Boyes, Femicide in Mexico: Statistical Evidence of an Increasing Trend, *Plos One*, Vol. 18, No. 1, 2023, hlm 1-20.

eksploitasi dan kekerasan. Selain itu, norma-norma budaya yang mengakar dalam masyarakat patriarki meminggirkan perempuan, memperkuat ideologi yang menempatkan mereka sebagai objek kontrol atau kepemilikan. Dalam banyak kasus, perempuan yang mencoba keluar dari hubungan yang penuh kekerasan justru menghadapi ancaman pembunuhan, menunjukkan bagaimana struktur sosial yang mendukung dominasi laki-laki menjadi faktor utama dalam terjadinya femisida.

Data statistik tentang femisida di Meksiko juga mencerminkan kegagalan dalam sistem pelaporan dan pencatatan kasus oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan laporan dari *Observatorio Ciudadano Nacional del Femicidio* (OCNF), banyak kasus pembunuhan perempuan tidak diidentifikasi sebagai femisida karena kurangnya pelatihan aparat dalam mengenali elemen gender dalam kejahatan tersebut.¹³ Sebagai contoh, jika korban ditemukan dalam kondisi tanpa tanda-tanda kekerasan seksual atau mutilasi, kasus tersebut cenderung dianggap sebagai pembunuhan biasa, meskipun ada bukti kuat bahwa kejahatan tersebut dimotivasi oleh kebencian terhadap perempuan. Ketidakkonsistenan dalam pencatatan ini tidak hanya menyebabkan data yang dihasilkan menjadi tidak akurat, tetapi juga memperburuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

Selain jumlah kasus yang terus meningkat, karakteristik femisida di Meksiko menunjukkan pola-pola tertentu yang mencerminkan dinamika kekerasan berbasis gender. Sebagian besar kasus melibatkan pelaku yang memiliki hubungan dekat dengan korban, seperti pasangan intim, mantan pasangan, atau anggota keluarga. Pola ini menunjukkan bahwa femisida sering kali terjadi dalam ruang domestik, di mana perempuan menghadapi risiko kekerasan dari orang-orang yang seharusnya memberikan perlindungan. Di sisi lain, kasus-kasus femisida yang terjadi di ruang publik sering kali melibatkan kejahatan terorganisir, di mana perempuan menjadi korban eksploitasi seksual atau digunakan sebagai alat untuk mengirim pesan kepada kelompok kriminal lainnya.

Salah satu tren yang mengkhawatirkan dalam statistik femisida di Meksiko adalah tingkat impunitas yang sangat tinggi. Berdasarkan data yang tersedia, lebih

¹³ Chiara Stassi, Marco La Mantia, Giuseppe Francesco Lo Re, Valentina Martines, Stefania Zerbo, Giuseppe Davide Albano, Ginevra Malta, dan Antonina Argo, *Femicide Circumstances and Harmfulness: Case Report and Focusing Review*, *Diagnostics*, Vol. 14, No. 1, 2024, hlm 1-8.

dari 90 persen kasus femisida tidak pernah diselesaikan, dengan pelaku yang tetap bebas atau menerima hukuman yang tidak memadai. Impunitas ini bukan hanya hasil dari kelemahan dalam sistem peradilan, tetapi juga mencerminkan ketidakpedulian institusional terhadap nasib perempuan yang menjadi korban. Dalam banyak kasus, keluarga korban menghadapi hambatan besar dalam mendapatkan akses ke keadilan, termasuk kurangnya respons dari aparat penegak hukum, proses investigasi yang lambat, dan tekanan sosial yang menyalahkan korban atas kekerasan yang mereka alami. Tingkat impunitas yang tinggi ini tidak hanya memperkuat rasa takut di kalangan perempuan, tetapi juga mendorong pelaku untuk melanjutkan tindakan kekerasan tanpa rasa takut terhadap konsekuensi hukum.

Selain itu, tren femisida di Meksiko menunjukkan bahwa kekerasan ini tidak terjadi secara acak, tetapi sering kali mengikuti pola-pola tertentu yang didukung oleh struktur sosial dan budaya yang patriarkal. Dalam banyak kasus, femisida terjadi setelah periode panjang kekerasan domestik atau pelecehan, di mana korban sering kali tidak memiliki akses ke perlindungan yang memadai. Misalnya, laporan menunjukkan bahwa banyak korban femisida telah mengajukan keluhan sebelumnya kepada pihak berwenang tentang ancaman atau kekerasan yang mereka alami, tetapi keluhan tersebut diabaikan atau tidak ditindaklanjuti. Kegagalan untuk bertindak dalam kasus-kasus ini mencerminkan masalah sistemik dalam sistem peradilan pidana Meksiko, yang sering kali lebih fokus pada penindakan setelah kejahatan terjadi daripada pencegahan.

Penyebab utama femisida di Meksiko adalah norma-norma patriarki yang mendominasi struktur sosial dan budaya.¹⁴ Masyarakat patriarkal cenderung menempatkan laki-laki pada posisi dominan, sementara perempuan dipandang sebagai pihak yang lebih rendah, baik dalam ruang publik maupun domestik.¹⁵ Norma semacam ini menciptakan lingkungan yang memungkinkan kekerasan terhadap perempuan dianggap sebagai sesuatu yang wajar atau bahkan diperlukan untuk mempertahankan kendali. Dalam konteks hubungan intim, kekerasan sering

¹⁴ Cecilia Martinez Gomez, *La Estructura Patriarcal y La Constante Violencia Contra Las Mujeres em Mexico*, *Ciencia Juridica*, Vol. 11, No. 21, 2022, hlm 87-105.

¹⁵ Saadet Altay, *Patriarchy and Women's Subordination: A Theoretical Analysis*, *Journal of Oriental Scientific Research*, Vol. 11, No. 1, 2019, hlm 411-427.

kali digunakan sebagai alat untuk menegaskan dominasi laki-laki, sementara perempuan yang mencoba melawan kontrol ini kerap menghadapi ancaman kekerasan yang lebih ekstrem, termasuk pembunuhan. Norma-norma patriarki juga tercermin dalam sikap masyarakat yang menyalahkan korban atas kekerasan yang mereka alami, alih-alih mengevaluasi perilaku pelaku atau sistem yang mendukung tindakan tersebut.

Ketimpangan ekonomi juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kerentanan perempuan terhadap kekerasan berbasis gender. Di Meksiko, perempuan dari latar belakang ekonomi rendah menghadapi risiko yang jauh lebih besar dibandingkan dengan perempuan dari kelas sosial yang lebih tinggi. Ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, dan sumber daya ekonomi lainnya menciptakan ketergantungan perempuan pada pasangan mereka, yang pada gilirannya memperkuat dinamika kekuasaan yang tidak seimbang. Ketika perempuan berada dalam situasi di mana mereka tidak dapat meninggalkan hubungan yang penuh kekerasan karena ketergantungan ekonomi, mereka menjadi lebih rentan terhadap eskalasi kekerasan yang dapat berujung pada femisida. Di sisi lain, perempuan yang mencoba keluar dari situasi tersebut sering kali menghadapi ancaman kekerasan yang lebih besar, karena pelaku merasa kehilangan kendali atas mereka.

Faktor institusional juga sangat berperan dalam tingginya angka femisida di Meksiko. Sistem peradilan pidana di negara ini sering kali gagal memberikan perlindungan yang memadai bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan. Salah satu masalah utama adalah kurangnya pelatihan dan kapasitas aparat penegak hukum untuk mengenali dan menangani kasus kekerasan berbasis gender. Dalam banyak kasus, keluhan yang diajukan oleh korban tidak ditindaklanjuti, atau bahkan diabaikan sama sekali, menciptakan kesan bahwa sistem hukum tidak dapat dipercaya. Kelemahan dalam investigasi, seperti kurangnya pengumpulan bukti yang komprehensif atau hilangnya dokumen penting, semakin memperburuk situasi, membuat banyak kasus femisida tidak pernah mencapai tahap penuntutan. Tingkat impunitas yang tinggi, yang mencapai lebih dari 90 persen dalam kasus femisida, menjadi bukti nyata dari kegagalan sistemik ini. Situasi ini menciptakan lingkungan

di mana pelaku merasa kebal dari konsekuensi hukum, yang pada akhirnya mendorong keberlanjutan kekerasan terhadap perempuan.

Kejahatan terorganisir juga menjadi salah satu faktor yang memperburuk situasi femisida di Meksiko. Hubungan antara femisida dan aktivitas kejahatan terorganisir sangat jelas di wilayah-wilayah dengan kehadiran kuat kartel narkoba, seperti Ciudad Juárez dan Veracruz.¹⁶ Dalam konteks ini, perempuan sering kali menjadi korban eksploitasi seksual, perdagangan manusia, atau digunakan sebagai alat untuk mengirim pesan kepada kelompok kriminal lain. Misalnya, pembunuhan perempuan yang melibatkan mutilasi tubuh atau pameran publik sering kali dimaksudkan untuk menanamkan rasa takut di masyarakat atau sebagai bentuk balas dendam antara kelompok kriminal. Selain itu, hubungan yang erat antara kejahatan terorganisir dan institusi pemerintah yang korup menghambat upaya untuk menyelidiki dan mengadili kasus-kasus tersebut. Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum sendiri terlibat dalam aktivitas kriminal,¹⁷ yang semakin mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Ketidakadilan gender yang tertanam dalam kebijakan publik juga berkontribusi pada tingginya angka femisida. Banyak kebijakan yang diadopsi oleh pemerintah Meksiko gagal menangani akar masalah ketidaksetaraan gender yang menjadi dasar kekerasan terhadap perempuan. Misalnya, meskipun ada undang-undang yang mengakui femisida sebagai kejahatan pidana, implementasinya sering kali terbatas pada penindakan setelah kejahatan terjadi, tanpa upaya yang memadai untuk mencegah kekerasan sebelum mencapai titik ekstrem. Selain itu, alokasi anggaran untuk program-program perlindungan perempuan sering kali tidak memadai, sehingga banyak perempuan yang tidak memiliki akses ke layanan pendukung, seperti tempat penampungan atau konseling. Ketidakseimbangan ini mencerminkan kurangnya komitmen politik untuk menangani masalah kekerasan berbasis gender secara holistik.

¹⁶ Rocio Rosas Vargas, Marilu Leon Andrade, dan Tzatzil Isela Bustamante Lara, *Violencia, Femicidios y Crimen Organizado en Guanajuato, Mexico*, *Cuadernos del Cilha*, Vol. 34, No. 1, hlm 1-26.

¹⁷ Philip Matthew Stinson, John Liederbach, Michael Buerger, dan Steven L. Brewer, *To Protect and Collect: A Nationwide Study of Profit-Motivated Police Crime*, *Criminal Justice Studies*, Vol. 31, No. 3, hlm 310-331.

Selain faktor-faktor tersebut, peran media juga perlu diperhatikan dalam memengaruhi persepsi publik terhadap femisida. Liputan media tentang kasus-kasus femisida di Meksiko sering kali sensasional dan tidak menghormati privasi korban, yang memperkuat stigma terhadap perempuan dan keluarganya. Dalam banyak kasus, media lebih fokus pada aspek brutal dari kejahatan tersebut, tanpa menawarkan analisis yang mendalam tentang akar masalah atau langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasinya. Selain itu, cara media menggambarkan pelaku sering kali lebih simpatik dibandingkan dengan korban, yang mencerminkan bias gender yang mendalam dalam cara masyarakat memahami dan merespons kekerasan terhadap perempuan. Ketidakseimbangan dalam liputan ini tidak hanya menghambat upaya untuk meningkatkan kesadaran publik tentang femisida, tetapi juga memperkuat norma-norma sosial yang mendukung kekerasan berbasis gender.

Analisis Kebijakan Kriminal Terhadap Femisida

Kerangka legislasi yang dirancang untuk menangani femisida di Meksiko telah mengalami perkembangan substansial selama beberapa dekade terakhir. Salah satu pencapaian utama adalah pengakuan femisida sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dalam *Código Penal Federal* (KUHP Federal) pada tahun 2012. Perubahan bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum yang sebelumnya mengabaikan dimensi gender dalam pembunuhan perempuan. Legislasi tersebut memberikan definisi hukum yang menekankan elemen-elemen kunci, seperti kekerasan seksual sebelum kematian, mutilasi tubuh, hubungan emosional atau keluarga antara pelaku dan korban, serta indikasi kontrol gender oleh pelaku. Dengan mengadopsi definisi ini, pemerintah Meksiko berusaha menciptakan alat hukum yang lebih efektif untuk mendeteksi, menginvestigasi, dan menuntut kasus-kasus femisida.

Meski demikian, keberadaan legislasi yang progresif tidak serta-merta menjamin keberhasilan dalam implementasi.¹⁸ Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan hukum ini adalah kurangnya harmonisasi antara pemerintah federal dan negara bagian. Meskipun KUHP Federal telah mengatur secara spesifik mengenai

¹⁸ Kiki Tanlim, Surya Nita, dan Ahmad Ibrahim Badry, Dynamics of Progressive Law Implementation in Indonesia: Prospects and Challenges of Law in the Era of Industrial Society 4.0, *Pena Justisia*, Vol. 23, No. 1, 2024, hlm 1-23.

femisida, masing-masing negara bagian di Meksiko memiliki otonomi dalam sistem hukum pidananya, yang menyebabkan perbedaan besar dalam penerapan legislasi ini di berbagai wilayah. Sebagian negara bagian telah mengadopsi definisi dan prosedur hukum yang konsisten dengan standar federal, sementara yang lain belum memperbarui sistem hukum mereka atau tidak memiliki kapasitas untuk menerapkan kebijakan tersebut secara efektif. Akibatnya, perlakuan terhadap kasus femisida sangat bervariasi, dengan beberapa wilayah menunjukkan tingkat penuntutan yang rendah dan tingkat impunitas yang tinggi.

Kendala lain dalam implementasi legislasi femisida di Meksiko adalah kurangnya pelatihan dan sumber daya untuk aparat penegak hukum. Banyak petugas kepolisian, jaksa, dan hakim tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang karakteristik unik femisida, termasuk cara mengenali elemen gender dalam kejahatan ini dan bagaimana mengumpulkan bukti yang relevan. Dalam banyak kasus, ketidaktahuan atau bias gender di kalangan aparat penegak hukum menyebabkan kasus femisida salah dikategorikan sebagai pembunuhan biasa, yang berdampak pada rendahnya tingkat penuntutan dan hukuman bagi pelaku. Selain itu, kekurangan fasilitas forensik, laboratorium yang memadai, serta tim investigasi yang terlatih memperburuk kemampuan untuk menyelidiki perkara secara mendalam. Ketiadaan infrastruktur dan sumber daya yang mendukung membuat banyak kasus tidak terpecahkan, yang menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.¹⁹

Aspek penting lainnya dari implementasi legislasi femisida adalah hubungan antara sistem hukum dan masyarakat sipil. Dalam banyak kasus, keluarga korban dan kelompok masyarakat sipil memainkan peran penting dalam mendesak penegakan hukum dan memastikan bahwa kasus femisida tidak diabaikan oleh otoritas. Namun, sistem hukum yang ada sering kali tidak menyediakan mekanisme dukungan yang memadai bagi keluarga korban, yang harus menghadapi tekanan emosional, finansial, dan bahkan ancaman fisik selama proses hukum berlangsung. Kurangnya pendekatan berbasis korban dalam implementasi kebijakan, yang mengurangi

¹⁹ Nikolaos Tzenios, Contribute to Raising Awareness in a Community, *Epra Journals*, Vol. 8, No. 12, 2022, hlm 122-124.

efektivitas legislasi dalam memberikan keadilan yang berarti bagi perempuan dan keluarga mereka.

Korupsi dalam sistem peradilan juga menjadi hambatan besar dalam implementasi legislasi femisida di Meksiko. Aparat penegak hukum di tingkat lokal sering kali terlibat dalam praktik-praktik korupsi, seperti menerima suap untuk menghapus bukti, mengabaikan laporan, atau melindungi pelaku yang memiliki koneksi politik atau ekonomi. Dalam beberapa kasus, hubungan antara aparat keamanan dan kelompok kejahatan terorganisir juga menghambat investigasi kasus femisida, terutama di wilayah-wilayah yang didominasi oleh kartel narkoba. Korupsi tidak hanya mengurangi efektivitas legislasi, tetapi juga menciptakan lingkungan impunitas yang memperkuat keberlanjutan kekerasan terhadap perempuan.

Meskipun demikian, ada beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Meksiko untuk memperbaiki implementasi legislasi terkait femisida. Salah satu langkah yang menonjol adalah pendirian *Fiscalías Especializadas en Feminicidios* (Jaksa Khusus Femisida) di beberapa negara bagian, yang bertugas menangani kasus-kasus ini secara khusus. Unit-unit ini dirancang untuk meningkatkan koordinasi antara berbagai lembaga yang terlibat dalam investigasi dan penuntutan femisida, serta menyediakan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum. Namun, efektivitas unit terhambat oleh kekurangan dana, staf yang tidak memadai, serta resistensi dari aparat lokal yang tidak terbiasa dengan pendekatan baru.

Femisida di Meksiko memiliki dampak sosial yang meluas, tidak hanya bagi korban dan keluarga mereka, tetapi juga bagi masyarakat. Dampak sosial yang paling terlihat dari femisida adalah ketakutan kolektif yang merasuki masyarakat, khususnya perempuan. Ketika kasus-kasus pembunuhan berbasis gender tidak hanya berulang tetapi juga tidak dihukum secara layak, perempuan menjadi semakin takut untuk berpartisipasi dalam ruang publik. Di banyak kota di Meksiko, terutama wilayah dengan tingkat femisida yang tinggi seperti Ciudad Juárez atau Veracruz, perempuan cenderung membatasi mobilitas mereka untuk menghindari risiko kekerasan. Tidak hanya mengisolasi perempuan, tetapi juga menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan kegiatan sosial

lainnya. Ketakutan ini berdampak langsung pada hilangnya potensi produktivitas perempuan dalam masyarakat, yang pada gilirannya memperkuat siklus marginalisasi mereka. Ketika perempuan terpaksa mundur dari ruang publik karena ancaman kekerasan, masyarakat kehilangan kontribusi penting dalam berbagai sektor kehidupan, mulai dari ekonomi hingga politik.

Selain ketakutan individu, femisida juga menciptakan trauma kolektif yang membebani keluarga korban dan komunitas tempat mereka tinggal. Bagi keluarga korban, kehilangan seorang anggota keluarga perempuan melalui kekerasan brutal diiringi oleh pengalaman panjang ketidakadilan dalam sistem peradilan pidana. Banyak keluarga merasa dikhianati oleh negara yang seharusnya melindungi, tetapi justru gagal memberikan keadilan. Keluarga juga menjadi sasaran intimidasi oleh pelaku atau pihak-pihak yang berusaha menutupi kejahatan tersebut. Trauma yang dialami keluarga tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga sosial, di mana menghadapi stigma atau pengucilan dari komunitas mereka sendiri. Stigma dapat terjadi karena persepsi bahwa korban "bersalah" atas kekerasan yang mereka alami, atau karena adanya keengganan masyarakat untuk terlibat dalam upaya mencari keadilan.

Femisida juga memiliki dampak sistemik terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, khususnya aparat penegak hukum dan sistem peradilan pidana. Ketika lebih dari 90 persen kasus femisida tidak pernah diselesaikan, masyarakat kehilangan kepercayaan pada kemampuan negara untuk melindungi mereka. Tingginya tingkat impunitas menciptakan persepsi bahwa hukum tidak berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan, tetapi lebih sebagai simbol kosong yang tidak memiliki kekuatan nyata. Ketidakpercayaan yang timbul tidak hanya terbatas pada korban dan keluarga mereka, tetapi juga meluas ke seluruh masyarakat, yang melihat lemahnya sistem hukum sebagai ancaman terhadap keamanan dan stabilitas mereka. Dalam jangka panjang, ketidakpercayaan dapat melemahkan legitimasi negara, memperburuk hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta menciptakan peluang bagi kelompok kriminal untuk mengeksploitasi kekosongan otoritas.

Selain dampaknya terhadap individu dan keluarga, femisida juga menciptakan polarisasi sosial yang memperkuat ketegangan antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Di satu sisi, fenomena ini mendorong munculnya gerakan feminis dan masyarakat sipil yang menuntut reformasi struktural untuk melindungi perempuan. Gerakan-gerakan ini, seperti *Ni Una Más* dan demonstrasi besar-besaran di Mexico City, telah berhasil menarik perhatian nasional dan internasional terhadap krisis kekerasan berbasis gender di Meksiko. Namun, di sisi lain, gerakan ini menghadapi resistensi dari kelompok konservatif atau patriarkal yang melihat tuntutan tersebut sebagai ancaman terhadap norma-norma tradisional. Polarisasi ini menciptakan perpecahan yang memperumit upaya untuk menciptakan konsensus dalam reformasi kebijakan dan membangun solidaritas masyarakat dalam melawan femisida.

Femisida juga memiliki dampak jangka panjang terhadap norma-norma sosial dan budaya.²⁰ Ketika kekerasan berbasis gender menjadi hal yang berulang dan tidak dihukum, masyarakat mulai menerima kekerasan ini sebagai sesuatu yang "biasa" atau tidak dapat dihindari. Normalisasi ini tercermin dalam sikap masyarakat yang sering kali menyalahkan korban, daripada mengevaluasi pelaku atau sistem yang mendukung kekerasan tersebut. Dalam beberapa kasus, media juga memperkuat narasi ini dengan liputan yang sensasional atau bias gender, di mana korban direduksi menjadi objek eksploitasi visual, sementara pelaku digambarkan dengan cara yang lebih simpatik. Ketika hal ini terus dibiarkan tanpa tantangan, mereka memperkuat budaya impunitas yang memungkinkan kekerasan berbasis gender tetap berlangsung tanpa konsekuensi yang serius.

Dampak lain dari femisida yang tidak kalah penting adalah pelemahan struktur keluarga dan komunitas. Kehilangan seorang anggota keluarga perempuan melalui kekerasan yang brutal tidak hanya menciptakan trauma emosional, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial-ekonomi keluarga. Banyak korban femisida adalah perempuan yang memiliki peran penting dalam mendukung keluarga, baik secara finansial maupun emosional. Ketika mereka terbunuh, keluarga cenderung

²⁰ Hava Dayan, Chen Kugel, dan Guy Enosh, Exploring Homicide Diversity: Femicide Across Sociocultural Groups, *Crime & Delinquency*, Vol. 70, No. 1, 2022, hlm 234-256.

menghadapi kesulitan ekonomi yang akut, terutama jika mereka bergantung pada pendapatan atau dukungan yang diberikan oleh korban. Selain itu, anak-anak yang kehilangan ibu mereka akibat femisida sering kali mengalami dampak psikologis jangka panjang, termasuk gangguan stres pascatrauma, depresi, dan ketidakstabilan emosional. Dampak ini tidak hanya membebani keluarga, tetapi juga memiliki efek riak yang memperburuk disintegrasi sosial di tingkat komunitas.

Dalam konteks masyarakat yang lebih luas, femisida juga memperkuat ketidaksetaraan gender yang sudah ada. Ketika perempuan hidup di bawah ancaman kekerasan yang konstan, mereka kehilangan kebebasan untuk berpartisipasi secara setara dalam kehidupan publik. Dalam beberapa kasus, ancaman kekerasan ini digunakan sebagai alat untuk mengendalikan perempuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga memperkuat hierarki gender yang ada. Ketidaksetaraan ini tidak hanya merugikan perempuan, tetapi juga menghambat perkembangan masyarakat secara keseluruhan, karena potensi dan kontribusi perempuan tidak dapat diwujudkan sepenuhnya.

Reformasi kebijakan yang menyeluruh dan terintegrasi diperlukan untuk mengatasi femisida di Meksiko secara efektif. Tantangan yang kompleks dan multidimensi ini membutuhkan langkah strategis yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup pencegahan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, serta perubahan budaya. Upaya reformasi harus didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, masyarakat sipil, hingga komunitas internasional. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, Meksiko dapat menciptakan sistem yang lebih adil dan aman bagi perempuan serta memberantas akar masalah kekerasan berbasis gender.

Langkah pertama yang harus diambil adalah harmonisasi definisi hukum dan standar prosedural terkait femisida di seluruh negara bagian. Ketidaksesuaian hukum antarwilayah telah menciptakan ketimpangan yang menghambat penanganan kasus femisida secara efektif.²¹ Pemerintah federal perlu bekerja sama dengan negara bagian

²¹ Shannon Drysale Walsh dan Cecilia Menjivar, "What Guarantees Do We Have?" Legal Tools and Persistent: Impunity for Femicide in Guatemala, *Latin American Politics and Society*, Vol. 58, No. 4, 2016, hlm 31-55.

untuk memastikan bahwa definisi femisida diatur secara seragam dan mencakup semua elemen yang relevan, seperti kekerasan berbasis gender, pola ancaman sebelumnya, serta kondisi khusus seperti mutilasi atau kekerasan seksual sebelum pembunuhan. Standar prosedural juga harus distandarisasi, mulai dari tahap investigasi, pengumpulan bukti, hingga proses penuntutan, untuk memastikan bahwa setiap kasus diperlakukan secara konsisten di seluruh wilayah Meksiko. Harmonisasi nantinya akan membantu mengurangi ketimpangan dalam perlakuan terhadap korban dan meningkatkan akurasi data nasional tentang femisida, yang sangat penting untuk perencanaan kebijakan yang lebih baik.

Reformasi juga perlu mencakup peningkatan kapasitas institusional dalam sistem peradilan pidana. Pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, harus menjadi prioritas utama. Pelatihan ini harus mencakup cara mengenali elemen gender dalam kejahatan, mengumpulkan bukti secara profesional, dan menangani korban dengan cara yang sensitif dan mendukung. Selain itu, pendirian unit khusus untuk menangani kasus femisida di setiap negara bagian dapat membantu meningkatkan koordinasi dan fokus dalam investigasi serta penuntutan. Unit-unit ini harus dilengkapi dengan staf yang terlatih, fasilitas forensik modern, dan akses ke sumber daya yang memadai untuk memastikan bahwa setiap kasus ditangani secara menyeluruh dan transparan. Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum, tetapi juga mengirimkan pesan bahwa kejahatan terhadap perempuan tidak akan ditoleransi.

Selain fokus pada penegakan hukum, reformasi kebijakan juga harus mencakup langkah-langkah pencegahan yang lebih komprehensif. Pendidikan berbasis gender harus diperkenalkan di sekolah-sekolah sebagai bagian dari kurikulum nasional untuk mengajarkan nilai-nilai kesetaraan dan menghentikan normalisasi kekerasan berbasis gender sejak usia dini. Program pendidikan harus dirancang untuk membongkar stereotip gender yang mengakar dalam budaya masyarakat serta mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia. Di tingkat komunitas, kampanye kesadaran publik juga harus digalakkan untuk mengubah norma-norma sosial yang mendukung kekerasan terhadap perempuan. Kampanye semacam ini harus melibatkan pemimpin lokal, tokoh agama, dan organisasi masyarakat sipil

untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat diterima secara luas dan efektif.

Pemberdayaan perempuan juga merupakan komponen penting dalam reformasi kebijakan. Pemerintah harus memperluas akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, dan layanan sosial untuk mengurangi ketergantungan ekonomi mereka pada pasangan atau keluarga. Program-program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan dan akses ke modal usaha, dapat membantu perempuan menjadi lebih mandiri dan mengurangi risiko kekerasan dalam hubungan interpersonal. Selain itu, layanan dukungan bagi korban kekerasan berbasis gender harus diperluas dan diperkuat. Pendirian tempat penampungan yang aman, konseling psikologis, dan bantuan hukum gratis dapat membantu korban pulih dari trauma dan mendapatkan keadilan. Pemerintah juga harus memastikan bahwa layanan ini tersedia secara merata di seluruh wilayah Meksiko, termasuk di daerah pedesaan dan komunitas adat yang sering kali kurang terlayani.

Kerjasama internasional juga dapat memainkan peran kunci dalam reformasi kebijakan terkait femisida di Meksiko. Pemerintah dapat belajar dari praktik terbaik di negara-negara lain yang telah berhasil mengurangi kekerasan berbasis gender melalui kebijakan yang progresif. Misalnya, pendekatan keadilan restoratif di Selandia Baru atau sistem pengadilan khusus gender di Spanyol dapat menjadi model bagi Meksiko untuk menciptakan sistem yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban. Bantuan teknis dan keuangan dari organisasi internasional juga dapat digunakan untuk memperkuat kapasitas institusional dan mendukung program-program pemberdayaan perempuan. Selain itu, kerjasama lintas negara diperlukan untuk menangani dimensi transnasional dari femisida, seperti perdagangan manusia dan eksploitasi seksual yang sering kali melibatkan jaringan kriminal internasional.

Pada akhirnya, reformasi kebijakan yang efektif membutuhkan kemauan politik yang kuat dari pemerintah di semua tingkat. Tanpa komitmen yang jelas dan konsisten untuk memberantas femisida, upaya reformasi akan tetap terbatas pada retorika tanpa tindakan nyata. Pemerintah harus menjadikan pemberantasan femisida sebagai prioritas nasional dan mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk mendukung semua langkah yang diperlukan. Selain itu, keterlibatan

masyarakat sipil dalam proses reformasi harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirancang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Integrasi dalam setiap pendekatan tersebut memicu Meksiko dapat menciptakan sistem yang lebih adil dan aman bagi perempuan, sekaligus mengatasi akar masalah yang mendukung kekerasan berbasis gender.

IV. CONCLUSION AND SUGGESTION

Femisida di Meksiko merupakan cerminan dari kegagalan sistemik yang berakar pada ketimpangan gender, lemahnya institusi penegak hukum, dan budaya impunitas yang mengakar dalam masyarakat. Meskipun upaya legislasi telah dilakukan dengan mengakui femisida sebagai kejahatan pidana khusus, implementasinya masih jauh dari memadai. Ketidaksesuaian antar-negara bagian, kurangnya harmonisasi hukum, serta ketidakmampuan institusi untuk mengidentifikasi dan menuntut pelaku secara efektif menciptakan lingkungan di mana keadilan sulit dicapai. Selain itu, korupsi dalam sistem hukum dan keterbatasan sumber daya semakin memperburuk situasi, yang menyebabkan tingginya angka impunitas dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Dampak sosial dari femisida sangat luas, mulai dari trauma emosional bagi keluarga korban, ketakutan kolektif di kalangan perempuan, hingga kerusakan sosial yang memperburuk ketidaksetaraan gender. Fenomena ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga melemahkan struktur sosial, ekonomi, dan politik secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemberantasan femisida membutuhkan reformasi yang menyeluruh dan terintegrasi, yang melibatkan penegakan hukum yang lebih efektif, perubahan norma budaya, serta pemberdayaan perempuan di semua lapisan masyarakat.

Reformasi kebijakan yang diusulkan harus berfokus pada harmonisasi hukum di seluruh wilayah Meksiko, peningkatan kapasitas institusional, dan penguatan mekanisme pengawasan yang independen untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus. Selain itu, langkah-langkah preventif, seperti pendidikan berbasis gender hingga program pemberdayaan ekonomi perempuan, sangat penting untuk mengatasi akar penyebab femisida. Pemerintah juga harus

memperluas akses terhadap layanan dukungan bagi korban dan keluarga termasuk tempat penampungan, konseling, dan bantuan hukum, yang tersedia secara merata di seluruh wilayah. Di tingkat internasional, kerjasama dengan negara lain dan organisasi global dapat memberikan perspektif baru serta mendukung penguatan kapasitas institusional di Meksiko. Tanpa komitmen politik yang kuat dan tindakan yang konsisten, reformasi kebijakan hanya akan menjadi langkah simbolis tanpa dampak nyata. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, Meksiko dapat membangun sistem peradilan pidana yang lebih adil sekaligus menciptakan masyarakat yang lebih setara dan bebas dari kekerasan berbasis gender.

V. BIBLIOGRAPHY

- Albana Metaj-Stojanova, Femicide-The Most Extreme Form of Violence Against Women, *Knowledge International Journal*, Vol. 40, No. 6, 2020, hlm 1071-1076.
- Alejandra Araiza Diaz, Flor Carina Vargas Martinez, dan Uriel Medecigo Daniel, La Tipificacion del Femicidio em Mexico. Un Dialogo Entre Argumentos Sociologicos y Juridicos, *Plos One*, Vol. 18, No. 12, 2023, hlm 1-20.
- Ana Lorena Jiménez Preciado dan Cesar Gurrola Rios, Characterising Crime Incidence in Mexico: A Hierarchical Linkage Clustering Analysis, *Institution and Economies*, Vol. 14, No. 4, 2022, hlm 25-54.
- Assiye Aka, The Perception of Femicide from the Third Party's Perspective: An Analysis on Justice/Injustice in Turkiye, *Sociology Mind*, Vol. 13, No. 3, 2023, hlm 123-144.
- Cecilia Martinez Gomez, La Estructura Patriarcal y La Constante Violencia Contra Las Mujeres em Mexico, *Ciencia Juridica*, Vol. 11, No. 21, 2022, hlm 87-105.
- Chiara Stassi, Marco La Mantia, Giuseppe Francesco Lo Re, Valentina Martines, Stefania Zerbo, Giuseppe Davide Albano, Ginevra Malta, dan Antonina Argo, Femicide Circumstances and Harmfulness: Case Report and Focusing Review, *Diagnostics*, Vol. 14, No. 1, 2024, hlm 1-8.
- Eva Selene Hernandez Gress, Martin Flegl, Aleksandra Krstikj, dan Christina Boyes, Femicide in Mexico: Statistical Evidence of an Increasing Trend, *Plos One*, Vol. 18, No. 1, 2023, hlm 1-20.

- Giselle Figueroa, Rethinking 'Femicide': The Role of Organized Crime Groups in Increased Rates of Femicide in Mexico, *Willam & Mary*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm 1-52.
- Hava Dayan, Chen Kugel, dan Guy Enosh, Exploring Homicide Diversity: Femicide Across Sociocultural Groups, *Crime & Delinquency*, Vol. 70, No. 1, 2022, hlm 234-256.
- Kiki Tanlim, Surya Nita, dan Ahmad Ibrahim Badry, Dynamics of Progressive Law Implementation in Indonesia: Prospects and Challenges of Law in the Era of Industrial Society 4.0, *Pena Justisia*, Vol. 23, No. 1, 2024, hlm 1-23.
- Majida Lubura, Concept of Femicide and Importance of Its Legal Regulation, *Strani Pravni Vzivot*, Vol. 1, No.3, 2017, hlm 115-130.
- Myrna Dawson, Haleakala Angus, dan Angelika Zecha, Identifying Femicide Using the United Nations Statistical Frameworks: Exploring the Feasibility of Sex/Gender-Related Motives and Indicators to Inform Prevention, *International Sociology*, Vol. 39, No. 3, 2024, hlm 309-331.
- Nikolaos Tzenios, Contribute to Raising Awareness in a Community, *Epra Journals*, Vol. 8, No. 12, 2022, hlm 122-124.
- Nur Fadhillah Mappaselleng dan Zul Khaidir Kadir, Hukum Acara Pidana Adversarial (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2020).
- Philip Matthew Stinson, John Liederbach, Michael Buerger, dan Steven L. Brewer, To Protect and Collect: A Nationwide Study of Profit-Motivated Police Crime, *Criminal Justice Studies*, Vol. 31, No. 3, hlm 310-331.
- Rocio Rosas Vargas, Marilu Leon Andrade, dan Tzatzil Isela Bustamante Lara, Violencia, Femicidios y Crimen Organizado em Guanajuato, Mexico, *Cuadernos del Cilha*, Vol. 34, No. 1, hlm 1-26.
- Saadet Altay, Patriarchy and Women's Subordination: A Theoretical Analysis, *Journal of Oriental Scientific Research*, Vol. 11, No. 1, 2019, hlm 411-427.
- Shannon Drysale Walsh dan Cecilia Menjivar, "What Guarantees Do We Have?" Legal Tools and Persistent: Impunity for Femicide in Guatemala, *Latin American Politics and Society*, Vol. 58, No. 4, 2016, hlm 31-55.

Sonia M. Frias, Femicide and Feminicide in Mexico: Patterns and Trends and Non-Indigenous Regions, *Feminist Criminology*, Vol. 18, No. 1, 2021, hlm 3-23.

Wania Pasinato dan Thiago Pierobom de Avila, Criminalization of Femicide in Latin America: Challenges of Legal Conceptualization, *Current Sociology*, Vol. 71, No. 1, 2022, hlm 60-77.

Zul Khaidir Kadir, Fragmented Justice: How the Wedding Cake Model is Influenced by the 'No Viral, No Justice' Phenomenon, *International Journal of Law Analytics (IJLA)*, Vol. 2, No. 4, 2024, hlm 315-330.